

ABSTRAC

Advocates are law enforcers whose professionalism depends on a structured organization. Following Constitutional Court Decision No. 112/PUU-XI/2013, advocate organizations in Indonesia have experienced fragmentation (multi-bar). This situation has created disorganization, differing recruitment standards, education, and enforcement of codes of ethics, weakening national oversight of the profession. This study aims to analyze the legal standing and organizational form of the National Advocates Council (DAN) to address this disorganization, specifically in light of Law No. 18 of 2003 concerning Advocates. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The study concludes that to maintain freedom of association and achieve professional unity, DAN should be established as a federation, not a single body (single bar). DAN's primary function is to establish uniform national professional standards, enforce codes of ethics, oversee legal aid, and strengthen the integrity of advocates as law enforcers. The establishment of DAN requires a revision of the Advocates Law to ensure strong legal standing.

Keywords: National Bar Council; Bar Organization; Federation

ABSTRAK

Advokat adalah penegak hukum yang profesionalismenya bergantung pada organisasi yang terstruktur. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XI/2013, organisasi advokat di Indonesia mengalami fragmentasi (multi-bar). Kondisi ini menciptakan ketidakteraturan, perbedaan standar rekrutmen, pendidikan, dan penegakan kode etik, yang melemahkan pengawasan profesi secara nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum dan bentuk organisasi Dewan Advokat Nasional (DAN) untuk mengatasi disorganisasi, khususnya ditinjau dari UU Nomor 18 Tahun 2003 terkait Advokat. Metode yang dipergunakan, yaitu yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan undang-undang dan konseptual. Temuan penelitian memberi simpulan bila untuk menjaga kebebasan berserikat dan mencapai kesatuan profesi, DAN sebaiknya dibentuk sebagai organisasi federasi, bukan wadah tunggal (single bar). Fungsi utama DAN adalah menetapkan standar nasional profesi yang seragam, menegakkan kode etik, mengawasi bantuan hukum, dan memperkuat integritas advokat sebagai penegak hukum. Pembentukan DAN memerlukan revisi Undang-Undang Advokat untuk legalitas yang kuat.

Kata kunci: Dewan Advokat Nasional; Organisasi Advokat; Federasi